

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa kondisi pemberdayaan gender memang menunjukkan sinyal positif terhadap pembangunan, namun tidak bisa menafikan fakta bahwa perempuan masih tertinggal dari laki-laki di berbagai arena. Pertama, dalam bidang pendidikan, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah perempuan tergolong lebih rendah apabila dibandingkan dengan laki-laki. Data ini menyiratkan bahwa kemampuan membaca dan menulis perempuan lebih rendah serta minimnya akses perempuan untuk menyelesaikan tingkat pendidikan wajib belajar 12 tahun. Kedua, dalam hal kesempatan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah perempuan juga lebih rendah daripada laki-laki. Adapun ketimpangan relasi berdasarkan jenis kelamin ini disebabkan oleh adanya tuntutan budaya yang mewajibkan perempuan memiliki tanggung jawab yang lebih besar di ranah domestik sehingga menyebabkan minimnya kemandirian/kebebasan finansial bagi perempuan dalam rumah tangga rentan. Ketiga, dalam hal kualitas kesehatan perempuan Indonesia, perempuan memiliki keluhan penyakit yang lebih tinggi dibanding laki-laki yang mana mengimplikasikan bahwa perempuan rentan sekali terpapar penyakit. Terlebih lagi minimnya akses pemenuhan gizi ibu hamil serta kesehatan seksual dan reproduksi semakin memperburuk kondisi kualitas kesehatan perempuan Indonesia. lebih lanjut, kualitas kesehatan perempuan juga turut dipengaruhi oleh kondisi kesehatan lingkungan yang buruk. Adapun hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya akses perempuan terhadap air minum dan sanitasi yang layak dibandingkan dengan laki-laki.

Keempat, dalam hal kepemimpinan perempuan Indonesia, representasi dan partisipasi perempuan di sektor privat dan publik memang semakin meningkat, namun legitimasi perempuan dalam perumusan dan pengambilan keputusan gagal dipertimbangkan. Dengan demikian, kondisi ketidaksetaraan gender antara perempuan dan laki-laki tetap menjadi determinan utama mengapa perempuan jauh lebih rentan

mengalami ketidakamanan ekonomi dan terjebak dalam kompleksitas kemiskinan secara tidak proporsional. Dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan, Oxfam sebagai aktor non-negara telah mengupayakan berbagai langkah yang mendorong akses dan kontrol perempuan yang lebih besar dalam berpartisipasi di ranah publik. Sudut pandang dan komitmen Oxfam dalam memajukan derajat kesejahteraan perempuan yang menitikberatkan pada nilai keadilan gender, keadilan ekonomi, dan kepemimpinan transformatif feminis sangat merefleksikan gagasan teori feminisme liberal. Dalam upaya pengentasan feminisasi kemiskinan oleh Oxfam, isu mengenai pendanaan menjadi esensial, Oxfam sebagai NGO mengalami perubahan dalam penggalangan dan pendanaan dana publik terkait program dan kegiatan Oxfam. Dalam hal pendanaan program, penyandang dana progresif memainkan peran penting dalam mendukung gerakan feminis untuk mengorganisir secara nasional, regional, dan transnasional. Untuk mengimplementasikan komitmen Konferensi Beijing yang menjadi momentum penting bagi komitmen global terhadap kesetaraan gender, penyandang dana perlu menyediakan sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk gerakan feminis dalam mengatasi akar penyebab dan perubahan sistemik kemiskinan. Dana feminis memiliki peranan kritis dalam menyediakan pendanaan strategis, mendukung gerakan interseksional, serta mengalihkan kekuasaan dalam lanskap filantropi dan pembangunan. Hal ini telah membangun kemitraan baru dan modalitas pendanaan yang dirancang untuk sumber daya gerakan feminis Selatan yang lebih baik dan memberikan rekomendasi untuk menciptakan ekosistem pendanaan feminis yang mendistribusikan kembali sumber daya dengan cara yang lebih terhubung, transparan, dan berdampak. Terakhir berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Oxfam mengatasi feminisasi kemiskinan di Indonesia tahun 2017-2019 dengan cara memberikan akses setara dan seluas-luasnya kepada perempuan di ranah publik sesuai dengan SDGs tujuan 1 dan tujuan 5 Agenda 2030.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Agar hasil penelitian ini dapat berkontribusi bagi perumusan keputusan oleh pemangku kepentingan dan bermanfaat bagi masyarakat luas, maka terdapat beberapa usulan yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Fenomena kemiskinan memiliki dimensi gender, sehingga strategi dan perumusan kebijakan pembangunan harus berdasarkan pada pengarusutamaan gender untuk memastikan baik penduduk perempuan maupun laki-laki dapat berpartisipasi dan menerima manfaat pembangunan secara adil dan setara.
2. Permasalahan feminisasi kemiskinan bersifat multi sektoral dan multi dimensi, oleh karena itu diperlukan kolaborasi dan koordinasi antar pihak termasuk pemerintah, LSM, dan swasta/bisnis secara komprehensif dan sistematis, serta tidak hanya melalui pendekatan *top-down* tetapi juga pendekatan *bottom-up/grassroots* untuk mencapai pembangunan yang lebih merata dan inklusif. Setiap pihak yang menjadi aktor dalam agenda pembangunan semakin meningkatkan komitmennya terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender terkhusus dalam pemantauan, pengawasan, serta evaluasi atas implementasi strategi guna mengoptimalkan pembangunan berkelanjutan di semua tingkatan.
3. Pengalaman Oxfam menunjukkan bahwa akuntabilitas pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up approaches*) dapat menjadi mekanisme penting dalam menekankan pengambilan keputusan, memastikan kepemilikan, komitmen, partisipasi dan mobilisasi masyarakat, serta akuntabilitas masyarakat terhadap proyek pembangunan nasional.

6.2.2 Saran Teoritis

Meski penelitian ini dapat menganalisis upaya Oxfam dalam menangani permasalahan feminisasi kemiskinan di Indonesia melalui sudut pandang yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, namun masih terdapat kelemahan dari

penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi perhatian lebih lanjut oleh penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengingat penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif, diperlukan adanya kajian lebih lanjut yang mengukur efektivitas program Oxfam dalam pembangunan nasional secara kuantitatif. Pendekatan penelitian ini lebih berfokus pada interpretasi fenomena dan eksplorasi makna, sedangkan jika ingin diuji dengan teori tertentu dan meneliti hubungan antara variabel agar hasil penelitian dapat terukur, maka diperlukan metode kuantitatif untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antar variabel.
2. Terdapat keterbatasan data sekunder yaitu data sekunder masih bersifat general dan tidak spesifik mengkaji kegiatan Oxfam dalam menangani feminisasi kemiskinan di Indonesia.
3. Teori feminisme liberal dalam penelitian ini hanya menganalisis sejauh mana asumsi teori feminisme liberal terefleksikan dan termanifestasikan dalam bentuk program Oxfam, belum sampai kepada tahap program tersebut dinilai efektivitasnya dalam data yang berangka (*numbered data*).